

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan wisata Pantai Lon Malang mempunyai karakter geografis yang khas, berupa wilayah pesisir dan laut yang masih sangat asri. Pengembangan Objek Wisata Pantai Lon Malang pada akhirnya tidak hanya bertujuan membawa keuntungan bagi dunia pariwisata saja, namun lebih dari itu, pengembangan ini juga akan diselaraskan dengan upaya-upaya konservasi yang jauh dari pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

Ditinjau dari prospek pertumbuhan kunjungan serta kualitas sediaan kawasan maka peran industry pariwisata saat ini digolongkan sebagai industri terbesar di Indonesia bahkan didunia dan merupakan sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan dan membuka lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat sekitar.

Salah satu sektor pariwisata yang akan dikembangkan di wilayah kabupaten sampang adalah objek wisata Pantai Lon Malang dimana potensi wisata alam tersebut belum dikembangkan dan dikelola dengan baik. Untuk itu dalam melakukan perencanaan tapak Pantai Lon Malang juga diperhatikan beberapa aspek yaitu: Aspek Lingkungan, Aspek Sosial, Aspek Ekonomis, dan Aspek Arsitektur. Berangkat dari hal tersebut diatas maka pendekatan perencanaan pengembangan Kawasan Wisata Lon Malang bertitik tolak pada faktor penentu kebutuhan wisata pantai dan darat serta fasilitas yang disesuaikan dengan fungsi dan standar besaran ruang.

Perencanaan pengembangan Pantai Lon Malang memiliki visi dan misi yaitu Mengembangkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan dengan berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan dan dilakukan dengan tata kelola yang baik serta terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku dan berupaya mendorong kemitraan sektor publik dan privat dengan tetap pada orientasi pada budaya dan kearifan lokal .

Otonomi daerah membawa konsekuensi bagi setiap daerah untuk merawat dan menggali potensi yang dimilikinya. Selain itu, daerah diberikan pilihan untuk mengelola sektor pariwisata yang potensial untuk mengoptimalkan pengembangan kabupaten. Susunan kepariwisataan di Indonesia terdiri dari tingkat daerah hingga nasional dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alamnya. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 8 disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan RIPPAPROV dan RIPPARKAB/KOTA juga menyesuaikan dengan jangka waktu rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota yang jangka waktunya sama dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJP). Namun, implementasi undang-undang kepariwisataan tersebut belum optimal karena beberapa rencana utama pariwisata mengalami disharmoni dalam skala masa berlakunya seperti RIPPAPROV Jawa Timur dan Jawa Tengah, atau RIPPAPROV-Kota Surakarta dan Balikpapan. Melalui metode penelitian Yuridis-normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, peneliti fokus menganalisis konsekuensi dari

ketidakharmonisan rencana utama pariwisata berdasarkan 3 (tiga) teori hukum yaitu teori sinkronisasi, teori harmonisasi, dan pengembangan teori hukum.

Pariwisata merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang ruang lingkup kajiannya sangat lengkap dan terkait erat dengan sektor lain, bahkan salah satu dari sektor lain tidak berfungsi dengan baik sehingga dapat berpengaruh terhadap kesinambungan pembangunan pariwisata tersebut. Selain peran antar sektor, hal lain yang tidak kalah penting yaitu rambu-rambu atau pedoman kebijakan pembangunan pariwisata. Setiap kebijakan lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan yang diharapkan mendapat dukungan dan partisipasi publik. Padahal publik belum paham bahkan melihat kebijakan seperti apa yang dibuat dan diberlakukan untuk kepentingannya dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Papua sebagai contoh yang kurang di dukung stakeholder sebagai bagian dari suatu kebijakan ketika diimplementasikan banyak kelompok masyarakat yang belum paham. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pemahaman sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, koordinasi dan kerjasama yang belum dibangun dengan baik antar stakeholder maupun antar pelaku pariwisata, serta dukungan biaya untuk pelaksanaan implementasi kebijakan yang ada sangat terbatas. Pada dasarnya, implementasi kebijakan yang dilakukan selama ini belum maksimal karena masalah letak geografis, tingkat partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, serta koordinasi dan kerjasama antar stakeholder atau pelaku pariwisata. Selain itu pemekaran provinsi, kabupaten/kota, menjadi pengaruh terhadap implementasi kebijakan itu sendiri. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut kurang mendapat perhatian dari publik terutama terhadap pertumbuhan sarana dan prasarana, jumlah kunjungan wisatawan, serta pengembangan potensi objek dan daya tarik wisata. Terbatasnya

dukungan publik terhadap program pembangunan pariwisata adalah akibat dari lambatnya pelayanan publik atau aparat pemerintah menyelenggarakan kebijakan serta pelayanan publik. Dengan demikian, potensi objek dan daya tarik wisata yang terdiri dari keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya yang dikembangkan dan dikelola belum maksimal serta berdampak terhadap publik. Hal yang juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan adalah karena belum adanya Keputusan Gubernur untuk pelaksanaannya. Dengan demikian implementasi kebijakan seharusnya mendapat dukungan para birokrat yang mempunyai kapasitas menentukan implementasi kebijakan yang sudah ada dengan dukungan biaya. Tetapi dalam kondisi objektif sekarang, ternyata kebijakan pemerintah daerah seperti RIPPDA belum mempunyai syarat strategis untuk menjadi pedoman pembangunan pariwisata di Papua. Dengan demikian, maka pola pengembangan pariwisata Papua bukanlah semata-mata berpedoman pada kebijakan yang telah ada, melainkan dilakukan berdasarkan kebutuhan Dinas Pariwisata Provinsi Papua. Bahkan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan situasi di Papua saat ini.

Rencana induk pengembangan kampung wisata merupakan salah satu upaya melestarikan suatu adat budaya yang ada di Desa Sahapm Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Kawasan Kampung wisata ini merupakan suatu kawasan wisata yang mempunyai adat dan budaya yang khas di Provinsi Kalimantan Barat. Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat seperti rumah panjang (Rumah Betang), menjadi potensi yang bisa dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata berbasis masyarakat.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah (Undang-Undang Kepariwisata No.10 tahun 2009). Sektor pariwisata

merupakan salah satu sumber devisa negara yang sangat penting dan mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan dan merupakan salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat terutama wisata alam. Dari sudut pandang akademisi, pariwisata didefinisikan sebagai studi yang mempelajari perjalanan manusia keluar dari lingkungannya, termasuk industri yang merespon kebutuhan manusia yang melakukan perjalanan.

Pariwisata adalah industri yang berkembang cepat di zaman sekarang ini. Di sejumlah negara, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang pariwisata digerakkan sebagai perekrut tenaga kerja yang sangat besar dan menjadi sumber pendapatan ekonomi yang sangat besar. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan kepariwisataan adalah kegiatan yang mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dilihat dari pengertian tersebut dapat digambarkan bahwa sebagian besar dari kegiatan pariwisata adalah berupa kegiatan manusia yang bersifat memenuhi keinginan manusia, terutama kebutuhan primer bukan lagi semata-mata kebutuhan sekunder apalagi kebutuhan tersier.

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu jenis pariwisata alternatif yang memasukkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama dalam pariwisata guna mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Telfer dan Sharpley, 2008). Pemahaman ini menyebutkan pariwisata berbasis masyarakat sebagai partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat lokal dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: proses pengambilan keputusan dan pembagian manfaat pariwisata. Partisipasi dalam pengambilan keputusan berarti masyarakat lokal mempunyai kesempatan untuk menyuarakan harapan, keinginan dan kekhawatirannya dari pembangunan pariwisata, yang selanjutnya dapat dijadikan masukan dalam proses perencanaan.

Pulau Madura merupakan satu dari ribuan pulau di Indonesia yang eksotis dan mempesona. Selain dikenal dengan Karapan Sapi, Madura juga memiliki banyak pulau yang menjadi destinasi wisata utama seperti Gili Iyang (Pulau Oksigen), Gili Labak, dan pulau-pulau kecil lainnya. Sebagai orang yang tinggal di bawah gunung atau bukit yang memiliki udara sejuk dan dingin, tentu pantai menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi. Pantai-pantai di Madura saat ini baik di Utara dan Selatan rata-rata sudah dikelola untuk dijadikan destinasi wisata.

Prinsip terjadinya perjalanan wisata ditandai oleh adanya unsur penarik dan pendorong berkaitan dengan tujuan orang berwisata. Keadaan yang menjadi daya tarik adalah keunikan dan keindahan budaya, bentang lahan dengan aneka flora dan faunanya, akomodasi yang nyaman, atraksi yang menarik, makanan khas lokal, cinderamata, harga-harga yang murah, keamanan, dan lain-lain. Pengembangan tempat wisata pada suatu wilayah harus dilandaskan pada dua komponen yaitu penawaran dan permintaan. Komponen tersebut akan mempengaruhi wisatawan untuk lebih mempertimbangkan tujuan wisatanya. Kesesuaian antara supply dan demand akan berdampak pada kepuasan wisatawan yang pada akhirnya mampu menciptakan nilai jual dan meningkatkan daya saing objek wisata (Cravens, 1997). Berikut adalah jumlah wisatawan dari tahun 2019- 2020 yang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1. 1 Jumlah pengunjung tahun 2020 – 2021 daftar wisata di Kabupaten Sampang

Nama wisata	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah wisatawan
Pantai camplong	7.168	15.450	22.618
Kolam renang sumber oto'	366	-	366
Gua lebar	1.427	-	1.427

Waduk klampis	1.427	2.540	3.967
Hutan kera nepa	5.372	4.860	10.232
Air terjun toroan	14.196	15.812	30.008
Situs rato ebuh	1.629	2.569	4.198
Situs trunojoyo	265	379	644
Makam sayyid utsman	1.320	-	1.320
Makam dan sumur tujuh panjilaras	1,061	951	2.012
Karang laut mandangin	562	3.231	3.793
Pantai lonmalang	21.840	69.487	91.327

Sumber data : Dinas Pariwisata Sampang 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat di lihat bahwa wisata pantai lon malang memiliki jumlah pengunjung lebih banyak dari wisata yang lain. Alasan penulis memilih wisata pantai lonmalang sebagai objek penelitian karena lokasi penting, didukung oleh banyak pihak baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, perangkat desa dan masyarakat.

Kabupaten Sampang merupakan sebuah kabupaten yang berada di Jawa Timur, Kabupaten ini menyimpan sejuta pesona dan panorama alam yang menakjubkan dan tersembunyi, sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui akan keindahan dan tempat keren yang ada di Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang punya banyak Spot objek wisata, Mulai dari Situs budaya, situs bersejarah, spot foto foto kekinian , sampai dengan wisata yang satu ini yaitu Wisata Pantai Lon Malang. Salah satu pantai yang dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDES) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dibuka sebagai destinasi wisata. Pantai Lon Malang terletak di Desa Bira Tengah di Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. memiliki potensi pantai di pesisir utara yang luar biasa, pemandangan ini bisa di dapati di sepanjang jalur nasional Pantura Madura Bangkalan- Sumenep.

Perkembanganya dunia pariwisata belakangan ini menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi. sehingga tingkat persaingan untuk mendatangkan wisatawan semakin sulit, sejalan dengan hal tersebut, akan menjadi tantangan bagi industri yang bergerak di bidang pariwisata untuk lebih memperhatikan kepuasan dan kebutuhan pengunjung karena dunia usaha pariwisata saat ini dihadapkan pada wisatawan yang semakin berpengetahuan dan menuntut pelayanan prima (Ayyagari, 2003). Untuk menarik dan memberikan kepuasan serta kebutuhan kepada pengunjung tentunya pengelola sebuah obyek wisata harus mempunyai fasilitas yang memadai guna menunjang kebutuhan wisatawan saat berwisata. Selain itu pengelola sebuah obyek wisata juga harus dapat mewujudkan harapan wisatawan yang berkunjung. Hal ini dikarenakan apa bila harapan wisatawan itu dapat terwujud sesuai yang di inginkanya, akan memberikan efek positif bagi pengelola sebuah obyek wisata.

Sebuah obyek wisata akan ramai dikunjungi wisatawan apabila sarana dan prasarana menuju maupun di obyek wisata itu sendiri sudah memadai, sehingga segala kebutuhan wisatawan saat berwisata dapat terpenuhi, selain sarana dan prasarana yang memadai sebuah objek wisata tentunya juga harus memiliki daya tarik yang dapat dinikmati serta berfariasi.

Dalam penelitian Arieta, (2011), yang dilakukan oleh masyarakat pesisir merupakan sebuah konsep yang sangat tepat untuk diaplikasikan. Masyarakat telah mampu merancang dan mengoprasikan dengan maksimal segala aktivitas pariwisata sesuai dengan karakteristik wilayah melalui tolak ukur iji produktivitas (menajemen kelompok) dan uji pemberdayaan (ekoliterasi dan ekodesain).

Pengembangan objek wisata segala elemen masyarakat sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kemajuan suatu objek wisata, terutama Masyarakat desa dapat memberikan inovasi baru. Sehingga dengan melibatkan masyarakat desa secara tidak langsung dapat membantu dalam rencana pengembangan wisata di daerahnya. Pengembangan dilakukan dengan menggalakkan program Sapta Pesona dengan sasaran partisipasi dari masyarakat Desa. Selain itu, penerapan Sapta Pesona Wisata juga akan menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah sehingga meningkatkan posisi masyarakat sebagai penerima manfaat yang sebesar-besarnya dari pengembangan kegiatan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata juga sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa dan semangat nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan (Hariyanto, 2011).

Sapta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat dan kebutuhan wisatawan. Sapta Pesona menjadi hal penting dalam dasar pengembangan wisata karena dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana kondusif. Sapta Pesona Wisata terdiri dari 7 aspek yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang ***“analisis realisasi masterplan pengembangan wisata pantai lonmalang”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan oleh peneliti di atas, maka fokus penelitian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses penyusunan masterplan wisata pantai lonmalang ?
2. Bagaimana implementasinya masterplan wisata pantai lonmalang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti yaitu:

1. Untuk menganalisis penyusunan masterplan pengembangan wisata pantai lonmalang

2. Untuk menganalisis realisasi masterplan pengembangan wisata pantai lonmalang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai implementasi dari perencanaan khususnya di bidang pariwisata Manfaat hasil penelitian untuk perkembangan ilmu ekonomi, yang antara lain dilihat dari Teori Ekonomi Mikro tentang permintaan konsumen terkait peningkatan minat wisatawan, Teori Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL), dalam perencanaan masterplan pengembangan wisata pantai lonmalang di Kabupaten Sampang

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah , Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk mengambil atau membuat kebijakan dalam mengembangkan sektor potensial terutama pada sektor pariwisata sebagai bahan rekomendasi kebijakan pemerintah kabupaten sampang dalam pengembangan wisata pantai lonmalang
- b. Bagi swasta , informasi tentang investasi dapat memaksimalkan untuk membantu program dalam pengembangan wisata pantai lonmalang
- c. Bagi masyarakat , adanya peluang lapangan pekerjaan, untuk mensejahterakan kehidupan

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan dalam penyajian dari masing-masing bab, yang terdiri dari 4 bab. Berikut ini merupakan sistematika penulisan penelitian :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab 2, berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber/informan, jenis data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan terkait dengan objek penelitian dan kondisi saat ini bagi penelitian, gambaran singkat analisis dan pembahasan mengenai hasil dari objek penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian akhir pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian yang sudah diteliti.